

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masuknya barang impor yang tidak terdaftar pada saat terjadinya impor barang, menyebabkan terjadinya kecurangan penerimaan kas atas bea masuk (Hayati dan Nst, 2017). Berdasarkan UUD 1945 alinea IV yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah dalam hal ini. Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) melakukan kegiatan di mana tujuannya menghimpun dana untuk mengisi kas negara. Peraturan perundang-undangan yang di dalamnya menjunjung tinggi setiap anggota, mengandung asas keadilan, menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk (Hayati dan Nst, 2017).

Peraturan Undang-undang merupakan bagian dari hukum fiskal yang harus dapat menjamin kepentingan masyarakat, kelancaran penerimaan bea masuk yang optimal serta menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional. Untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik, maka dibutuhkan sistem pengendalian yang baik. Pengendalian intern menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan sebagai dasar pengawasan dan juga pengontrol setiap kegiatan perusahaan agar dapat selalu berjalan sesuai dengan semestinya (Romney dan Steinbart, 2016). Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2016) definisi tersebut adalah : (1) menjaga kekayaan organisasi, (2) mengecek ketelitian

dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Apabila sistem pengendalian internal atas bea masuk berjalan dengan baik, maka akan terbentuk suatu iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional (Mulyadi, 2016).

Berdasarkan peraturan direktur jenderal nomor PER-46/BC/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memiliki sistem pengendalian intern terhadap kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi secara dini peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (Cukai, 2011).

Menurut Hirman dan Pratama (2018) dan Laksana *et al.* (2017) menyatakan kurangnya pengendalian akses dan pengawasan yaitu pengolahan data induk pegawai di KPU BC Tipe C Soekarno Hatta sehingga dapat terjadi timbulnya risiko karena adanya data induk pegawai yang digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas belum diperbaharui dan kegagalan dalam melakukan transfer dana ke rekening pelaksana SPD karena nomer rekening sudah tidak aktif atau ditutup oleh bank dan adanya kekeliruan dari sisi pencatatan transaksi piutang dan kurangnya ketelitian pada pengelola piutang perpajakan pada laporan keuangan pemerintah pusat.

Menurut Alfani dan Firmansyah (2018), Suprayitno dan Husodo (2017) menyatakan adanya kelemahan pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi yaitu karena memakai sistem instalasi sehingga jika aplikasi yang dipakai mempunyai *update* terbaru maka *update* tersebut harus

diinstall di setiap komputer dan menghabiskan waktu yang lama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi dan belum adanya format dan aplikasi khusus untuk pengelolaan premi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Simorangkir dan Firmansyah (2017) menyatakan adanya kelemahan pengendalian internal pada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X yaitu pengarsipan dokumen atas impor dilakukan oleh cleaning service yang seharusnya dilakukan oleh staf PFPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, salah satu cara untuk memelihara pengendalian yang menimbulkan perilaku positif adalah melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan beberapa permasalahan pada penelitian terdahulu menurut Hirman dan Pratama (2018) dan Laksana *et al.* (2017) menyatakan kurangnya pengendalian akses dan pengawasan yaitu pengolahan data induk pegawai di KPU BC Tipe C Soekarno Hatta belum diperbaharui dan adanya kekeliruan dari sisi pencatatan transaksi dan kurangnya ketelitian pada pengelola piutang perpajakan pada laporan keuangan pemerintah pusat. Alfani dan Firmansyah (2018) dan Suprayitno dan Husodo (2017) menyatakan adanya kelemahan pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi yaitu karena memakai sistem instalasi sehingga jika aplikasi yang dipakai mempunyai *update* terbaru maka *update* tersebut harus diinstall di setiap komputer pada Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi dan belum adanya format dan aplikasi khusus untuk pengelolaan premi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Simorangkir dan Firmansyah (2017) menyatakan adanya kelemahan pengendalian internal pada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X yaitu pengarsipan dokumen atas impor dilakukan oleh cleaning service yang seharusnya dilakukan oleh staf PFPD.

Berdasarkan hasil penelitian sistem pengendalian internal pada siklus bea masuk di Kantor Bea Cukai Malang. Penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan apabila terjadi kesalahan input dokumen PP22a pada CEISA Bea Cukai Pos Malang, pihak Bea Cukai juga harus menyesuaikan kembali antara dokumen penerima dengan orang penerima barang karena dapat mengakibatkan perbedaan antara nama pada dokumen dengan penerima barang dan ditemukan juga bahwa pihak Bea Cukai belum mengupdate data terbaru pada struktur organisasi.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang ?
- b. Bagaimana permasalahan pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang.
- b. Untuk mengidentifikasi permasalahan pengendalian internal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang dan sebagai bahan pendukung keputusan bahwa penilaian usaha sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian